

Partisipasi Komunikatif Mahasiswa dalam Merespons Isu Kebijakan Publik melalui Diskusi Film Dokumenter: Studi Kasus pada Mahasiswa Biak Papua

Fidelia Fonataba¹, Jelita Purnamasari^{2*}, Muhammad Ridwan Yunus³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, IISIP YAPIS Biak, Papua, Indonesia

*Corresponding Author Email: purnama.jelita09@gmail.com

Received: 1 July 2026; Revised: 8 July 2026; Accepted: 22 July 2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis partisipasi komunikatif mahasiswa dalam merespons isu kebijakan pemerintah melalui pengalaman menonton dan berdiskusi film dokumenter. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada mahasiswa program studi komunikasi yang aktif menonton film dokumenter "Pesta Babi" di berbagai komunitas diskusi informal di luar kampus (gereja, perkumpulan mahasiswa, dll). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 5 mahasiswa program studi komunikasi serta analisis dokumen rekaman diskusi yang dilakukan informan di komunitasnya masing-masing. Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menonton dan berdiskusi film dokumenter menghasilkan tiga pola partisipasi komunikatif. Pertama, dialog horizontal yang membangun pemahaman bersama tentang isu kebijakan, dimana mahasiswa saling bertukar pandangan dan menyadari bahwa isu tersebut merupakan masalah sosial yang membutuhkan perhatian kolektif. Kedua, negosiasi pemahaman isu kebijakan melalui tayangan visual dan kesaksian dalam film, dimana mahasiswa mendiskusikan validitas dan keberimbangan sudut pandang film. Ketiga, penguatan kapasitas mahasiswa untuk merumuskan, menyatakan, serta mempertimbangkan ulang pandangan mereka terhadap isu kebijakan. Film dokumenter berfungsi sebagai stimulus yang memfasilitasi pemahaman bersama dan mengurangi jarak kognitif antara mahasiswa dengan kompleksitas isu kebijakan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan konsep partisipasi komunikatif dalam konteks pendidikan politik, serta kontribusi praktis bagi perguruan tinggi dalam merancang program literasi media dan penguatan ruang publik mahasiswa yang dialogis.

Kata Kunci: Partisipasi komunikatif, film dokumenter, partisipasi mahasiswa, kebijakan publik, diskusi.

How to Cite: author1, author2, & author3. (2025). Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur Adipiscing Magna Sed Pulvinar Ultricies, Purus Lectus Malesuada Libero, Sit Amet Commodo Magna Eros Quis Urna. *SEMDIGOV: Seminar Nasional Digital Governance*, 1(1), 1-15.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap partisipasi politik mahasiswa di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena penting bagi partisipasi politik generasi muda, melengkapi peran organisasi tradisional seperti partai politik atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) (Ida, Saud, & Mashud, 2020; Kholid et al., 2015). Mahasiswa lebih aktif dalam bentuk partisipasi yang fleksibel dan personal di platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, seperti berbagi informasi politik, memberikan komentar, serta mengikuti kampanye digital (Kholid et al., 2015; Molaei, 2015). Mayoritas mahasiswa kini mengandalkan media sosial sebagai salah satu sumber utama untuk memperoleh informasi politik (Ida et al., 2020; Molaei, 2014). Namun, tren ini menunjukkan adanya pergeseran dari aktivisme konvensional menjadi aktivisme digital, di mana partisipasi cenderung bersifat reaktif dan tersebar tanpa struktur dialogis yang memadai (Lim, 2013; Asih, Novianto, & Setiawati, 2025). Aktivitas di media sosial seringkali bersifat dangkal dan rentan terhadap polarisasi opini, hoaks, serta disinformasi, tanpa pemahaman mendalam terhadap substansi isu yang diangkat (Molaei, 2014; Molaei, 2015). Studi juga mencatat bahwa meskipun keterlibatan digital meningkat, sebagian besar pemilih pemula dan mahasiswa masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang sistem pemilu dan representasi politik (Septian & Wulandari, 2024; Latif et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi justru berkorelasi dengan rendahnya intensi menggunakan platform media sosial untuk aktivitas politik, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran politik dan partisipasi digital yang produktif (Limilia & Fuady, 2021).

Sementara itu, film dokumenter sebagai medium komunikasi visual memiliki potensi untuk merangsang pemikiran kritis dan membuka ruang diskusi yang lebih terstruktur terkait isu kebijakan publik. Film dokumenter dinilai memiliki kekuatan untuk menghadirkan perspektif baru sekaligus menyampaikan pesan sosial-politik kepada masyarakat luas (Nichols, 2017; Renov, 1993). Di Indonesia, film dokumenter telah dimanfaatkan sebagai sarana advokasi kebijakan dan pembentukan pemikiran kritis terhadap isu-isu kontemporer, seperti yang terlihat dalam dokumenter-dokumenter produksi Watchdoc yang mengangkat isu reklamasi, konflik agraria, dan pelanggaran hak masyarakat adat (Budi Irawanto, 2010; Asia Research Institute, 2019). Kegiatan pemutaran dan diskusi film dokumenter di kalangan mahasiswa terbukti mampu menjadi wadah refleksi kolektif dan membuka ruang aspirasi bagi mahasiswa untuk memahami isu-isu marginal yang sering luput dari perhatian publik, seperti dalam kasus pemutaran dokumenter *Rayuan Pulau Palsu* yang memicu diskusi lintas disiplin tentang kebijakan reklamasi, perencanaan kota, dan studi lingkungan di berbagai kampus (Asia Research Institute, 2019). Film dokumenter juga memiliki peran penting dalam membentuk perspektif kognitif penonton, karena kombinasi visual, narasi, dan kesaksian langsung mampu menciptakan pengalaman emosional dan intelektual yang lebih mendalam dibandingkan media teks (Smaill, 2007; Kahana, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa film dokumenter mulai diakui sebagai medium yang efektif untuk membangun pemahaman kritis dan membuka ruang dialogis bagi mahasiswa dalam memahami isu-isu kebijakan yang kompleks (Renov, 1993; Winston, 2008).

Meskipun demikian, pemanfaatan film dokumenter sebagai wahana diskusi partisipatif yang terstruktur masih minim dilakukan di kalangan akademik. Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan medium film dokumenter dengan kerangka komunikasi partisipatif dalam konteks partisipasi politik mahasiswa Indonesia. Studi-studi *existing* lebih banyak berfokus pada partisipasi digital di media sosial secara umum (Ida et al., 2020; Kholid et al., 2015; Mashud et al., 2022), tanpa mempertimbangkan dimensi dialogis dari diskusi berbasis media audiovisual yang dilakukan secara tatap muka dalam komunitas informal. Selain itu, terdapat kesenjangan metodologis dimana penelitian tentang film dokumenter lebih banyak menyoroti aspek produksi, distribusi, dan etika pembuatan film (Nichols, 2017; Winston, 2008), bukan pada dinamika komunikasi yang terjadi dalam forum diskusi pasca-pemutaran yang dilakukan oleh mahasiswa di komunitas-komunitas informal di luar kampus. Penelitian ini berbeda karena fokusnya bukan pada proses produksi film, melainkan pada proses resepsi dan partisipasi komunikatif mahasiswa sebagai penonton dan peserta diskusi.

Konteks sosial-budaya di Papua juga turut memengaruhi dinamika partisipasi mahasiswa dalam merespons isu kebijakan publik. Berdasarkan disertasi Sari (2022), struktur sosial masyarakat Biak masih didominasi oleh sistem kekerabatan (*Keret*), dimana individu berposisi sebagai subordinat terhadap kepala klan. Akibatnya, suara masyarakat umum jarang terdengar dalam forum-forum pengambilan keputusan partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat Biak dalam perencanaan pembangunan tetap rendah, meskipun secara teoretis mahasiswa—sebagai bagian dari kelompok terdidik—seharusnya memiliki kapasitas kritis yang lebih tinggi untuk menyuarakan aspirasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi intelektual mahasiswa dengan ruang partisipasi yang tersedia secara struktural. Dalam konteks itulah, diskusi film dokumenter di komunitas-komunitas informal di luar kampus menjadi alternatif ruang ekspresi yang memungkinkan mahasiswa untuk melampaui hambatan struktural tersebut, sekaligus membangun pemahaman kolektif terhadap isu-isu kebijakan yang selama ini sulit diakses atau didiskusikan secara terbuka dalam forum-forum formal.

Konsep "Partisipasi Komunikatif" dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai partisipasi mahasiswa dalam proses komunikasi dialogis, bukan dalam artian teori pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dalam konteks ini, partisipasi komunikatif merujuk pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam dialog horizontal, negosiasi makna, dan pertukaran argumen dalam forum diskusi film dokumenter. Pendekatan ini sejalan dengan konsep dialogis dari Habermas (1989) mengenai ruang publik (*public sphere*) yang menekankan bahwa setiap peserta memiliki hak yang sama untuk berbicara dan didengar dalam proses pembentukan pemahaman bersama. Konsep komunikasi partisipatif dari Servaes (2008) juga mendukung pendekatan ini, khususnya prinsip dialogis yang menekankan bahwa komunikasi harus bersifat dua arah, horizontal, dan memberikan ruang bagi setiap peserta untuk menyuarakan perspektifnya dalam proses pembentukan makna kolektif (Turmudi, 2019; Servaes & Malikhaio, 2005).

Penelitian ini mengkaji pengalaman mahasiswa yang menonton film dokumenter "Pesta Babi" yakni sebuah film yang mengangkat isu pembangunan dan hak masyarakat adat di Papua, di berbagai

komunitas diskusi informal di luar kampus (seperti gereja dan perkumpulan mahasiswa), bukan dalam satu forum diskusi yang terstruktur. Fokus penelitian adalah pada bagaimana mahasiswa merefleksikan pengalaman diskusi mereka dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk partisipasi komunikatif mereka terhadap isu kebijakan publik. Pemilihan film "Pesta Babi" didasarkan pada karakteristik film tersebut yang mengangkat isu kebijakan pemerintah yang kontroversial dan kompleks, sehingga memiliki potensi untuk memicu diskusi mendalam di kalangan mahasiswa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika komunikasi partisipatif mahasiswa dalam merespons isu kebijakan pemerintah melalui diskusi film dokumenter, dengan fokus pada: (1) pola interaksi dan pertukaran argumen dalam diskusi, (2) peran film dokumenter sebagai stimulus komunikasi, dan (3) bentuk-bentuk partisipasi yang dihasilkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan teori komunikasi partisipatif dalam konteks pendidikan politik, serta kontribusi praktis bagi perguruan tinggi dalam merancang program literasi media dan penguatan ruang publik mahasiswa yang dialogis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika komunikasi partisipatif mahasiswa dalam diskusi film dokumenter, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2021). Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dalam konteks nyata, di mana batas antara fenomena dan konteks tidak selalu jelas (Yin, 2018). Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengalaman mahasiswa dalam menonton dan berdiskusi film dokumenter "Pesta Babi" di komunitas-komunitas informal di luar kampus. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter di komunitasnya masing-masing, serta menganalisis dokumen rekaman diskusi yang dilakukan informan.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) mahasiswa aktif program studi komunikasi, (2) telah mengikuti kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter "Pesta Babi" di komunitasnya masing-masing (gereja, perkumpulan mahasiswa, atau komunitas informal lainnya di luar kampus), dan (3) bersedia menjadi informan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 5 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang aktif dalam komunitas diskusi film di luar kampus. Jumlah informan ini sesuai dengan prinsip *small sample research* dalam penelitian kualitatif, dimana kedalaman data lebih diutamakan daripada kuantitas (Braun & Clarke, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang bersifat terbuka untuk mendorong informan merefleksikan pengalaman diskusi mereka secara mendalam. Wawancara dirancang untuk menggali tiga aspek utama: (a) pola interaksi dan pertukaran argumen dalam diskusi, (b) peran film dokumenter sebagai stimulus komunikasi, dan (c) bentuk-bentuk partisipasi yang dihasilkan. Kedua, analisis dokumen rekaman diskusi film dokumenter yang telah berlangsung di komunitas masing-

masing informan. Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi dan memperkaya data wawancara, khususnya terkait dinamika interaksi yang terjadi dalam forum diskusi (Yin, 2018).

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan: (1) kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dari seluruh catatan wawancara dan dokumen; (2) penyajian data (*data display*), yaitu penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk teks naratif dan matriks untuk memudahkan penarikan kesimpulan; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu interpretasi makna dari pola-pola yang ditemukan. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tematik yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2021).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara dengan dokumen rekaman diskusi, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara mendalam dengan analisis dokumen. Selain itu, peneliti melakukan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan untuk memastikan akurasi data (Creswell & Poth, 2021).

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menemukan tiga pola partisipasi komunikatif yang terbentuk dalam pengalaman menonton dan berdiskusi film dokumenter, yang menjawab tiga fokus penelitian: (1) pola interaksi dan pertukaran argumen, (2) peran film dokumenter sebagai stimulus komunikasi, dan (3) bentuk-bentuk partisipasi yang dihasilkan.

Pola Interaksi dan Pertukaran Argumen

Hasil wawancara menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter yang dilakukan mahasiswa di komunitas-komunitas informal (gereja, perkumpulan mahasiswa) menghasilkan pola interaksi yang bersifat horizontal, dimana mahasiswa saling bertukar pandangan secara setara tanpa adanya dominasi dari satu pihak. Pola ini terbentuk karena forum diskusi yang bersifat tatap muka memungkinkan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, berbeda dengan interaksi di media sosial yang sering kali didominasi oleh suara-suara tertentu dengan algoritma yang memperkuat opini mayoritas.

Salah satu informan, P (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, semester 6, IISIP Yapis Biak), menyatakan:

"Awalnya saya tidak tertarik menonton film tentang pemerintah, namun setelah melihat potongan-potongan film yang viral di Instagram, saya merasa sedih sekali dan akhirnya tertarik untuk menonton film tersebut di gereja" (P, wawancara, 2026).

Dari pernyataan ini, dapat diinterpretasikan bahwa media sosial berperan sebagai pemicu awal ketertarikan melalui konten viral yang mampu membangkitkan respons emosional. Rasa sedih yang muncul menjadi pintu masuk bagi P untuk kemudian terlibat dalam pengalaman menonton secara

kolektif di komunitas gereja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial efektif sebagai alat penyebaran informasi awal, ia tidak cukup untuk menciptakan keterlibatan yang mendalam. Justru forum diskusi tatap muka di komunitas informal-lah yang memungkinkan terjadinya dialog yang lebih substantif dan bermakna. Dengan kata lain, media sosial berfungsi sebagai jembatan pengantar, sementara diskusi tatap muka menjadi ruang utama dimana pemahaman dan makna dibangun secara kolektif. **P** juga menyatakan:

"Pendapat teman-teman itu dia berpendapat kalau dia melihat ini itu pembangunan juga memiliki manfaat bagi masyarakat tentunya. Tapi itu tuh harus berseimbangan begitu" (**P**, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dialog horizontal dalam forum diskusi mendorong **P** untuk keluar dari zona nyaman intelektualnya. Sebelum berdiskusi, **P** mungkin hanya memiliki pemahaman tunggal berdasarkan narasi film yang ia tonton. Namun, melalui pertukaran pandangan dengan teman-temannya, ia mulai melihat bahwa isu pembangunan memiliki dimensi yang lebih kompleks yakni tidak semata-mata salah atau benar, melainkan membutuhkan pertimbangan yang berimbang antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Proses ini menunjukkan bahwa diskusi tatap muka memungkinkan terjadinya negosiasi makna, dimana mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif membandingkan, mempertimbangkan, dan merevisi pemahaman mereka berdasarkan argumen yang disampaikan oleh peserta lain.

Informan lainnya, **G** (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, semester 4, IISIP Yapis Biak), menyatakan:

"Saya juga merasa bahwa pemerintah itu harus buka mata... Bahwa apa yang mereka lakukan ini, karena mungkin saya sebagai warga Papua... saya melihat bagaimana, jujur merinding nonton film itu. Bagaimana ribuan tentara diarahkan untuk melawan masyarakat adat" (**G**, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengandung beberapa lapisan makna yang perlu diinterpretasikan. Pertama, respons emosional yang kuat ("merinding") menunjukkan bahwa film dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai medium informasi, tetapi juga sebagai medium yang membangkitkan empati dan keterlibatan afektif. Kedua, identitas **G** sebagai warga Papua memberikan dimensi personal pada pengalaman menontonnya yakni ia tidak sekadar menjadi penonton netral, tetapi merasakan keterkaitan langsung dengan isu yang ditampilkan. Ketiga, pernyataan "pemerintah itu harus buka mata" mencerminkan harapan agar penguasa lebih peka dan responsif terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan terhadap masyarakat adat. Perubahan pandangan **G** dari sekadar menonton menjadi memiliki kesadaran kritis dan harapan akan perubahan, mengindikasikan bahwa diskusi tatap muka memungkinkan terjadinya transformasi pemahaman yang bersifat personal dan emosional, tidak hanya kognitif. Pertukaran argumen dalam diskusi terjadi melalui proses tanya-jawab dan sanggahan yang terstruktur. **G** mengungkapkan:

"Mulai banyak isu-isu gitu kan. Kayak orang bilang film ini adalah film yang dibuat karena atas dasar kebencian dia kepada pemerintah dan lain sebagainya. Ya, we never know gitu" (G, wawancara, 2026).

Dari pernyataan ini, dapat diinterpretasikan bahwa forum diskusi menyediakan ruang bagi munculnya berbagai perspektif yang saling bersilangan, termasuk pandangan yang kritis terhadap film itu sendiri. Sikap G yang tidak serta-merta menerima atau menolak tuduhan tersebut, dengan pernyataan "*we never know*" yakni menunjukkan adanya kapasitas berpikir kritis yang berkembang. Ia tidak terjebak dalam polarisasi opini yang hitam-putih, melainkan memilih untuk tetap berada dalam posisi yang reflektif dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan lain. Hal ini juga mengindikasikan bahwa suasana diskusi yang saling menghormati memungkinkan peserta untuk menyampaikan pendapat yang kontroversial sekalipun tanpa menimbulkan konflik yang destruktif. Proses sanggahan yang terjadi tidak bersifat konfrontatif, melainkan konstruktif, karena dilakukan dalam kerangka dialog yang menghargai perbedaan pendapat. Mahasiswa tidak hanya menyatakan posisi setuju atau tidak setuju, tetapi juga memberikan alasan yang mendasari pandangan mereka. Sebagaimana diungkapkan G:

"Saya setuju dengan film karena saya melihat bukti visual yang kuat, tapi teman saya justru melihat film ini kurang berimbang karena tidak menampilkan suara pemerintah. Kami akhirnya berdiskusi tentang pentingnya melihat dari berbagai sisi" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pertukaran argumen dalam diskusi tidak berhenti pada pernyataan sikap, tetapi dilanjutkan dengan pemberian alasan dan justifikasi yang memperkaya diskusi. G mendasarkan persetujuannya pada bukti visual yang ia saksikan sendiri dalam film, menunjukkan bahwa pengalaman menonton secara langsung memberikan otoritas pada pandangannya. Sementara itu, temannya yang menyoroti ketidakberimbangan film menunjukkan kesadaran akan pentingnya melihat isu dari berbagai perspektif, termasuk sudut pandang pemerintah yang mungkin tidak ditampilkan. Perdebatan ini berakhir pada kesepakatan bahwa isu kebijakan publik membutuhkan pemahaman yang multidimensional, tidak cukup hanya mengandalkan satu sumber informasi. Pertukaran argumen yang disertai alasan ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter mampu menciptakan ruang dialog yang lebih demokratis dan substantif dibandingkan interaksi di media sosial yang cenderung monologis dan dangkal.

Yang menarik, beberapa informan melaporkan adanya perubahan pandangan setelah mendengar argumen teman lain. P menyatakan:

"Awalnya saya sangat setuju dengan sudut pandang film, tapi setelah teman saya menunjukkan bahwa film ini hanya menampilkan satu sisi, saya mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada informasi lain yang perlu saya cari" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa diskusi tatap muka memungkinkan terjadinya negosiasi makna secara langsung, dimana mahasiswa tidak hanya menerima narasi film secara mentah, tetapi juga mengkritisnya melalui pertukaran argumen dengan sesama peserta. Perubahan pandangan P menunjukkan bahwa ia tidak terjebak dalam *confirmation bias* yakni kecenderungan untuk hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan awal. Sebaliknya, ia menunjukkan keterbukaan

intelektual untuk merevisi pandangannya berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan oleh temannya. Proses ini penting karena menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter tidak berfungsi sebagai alat indoktrinasi, melainkan sebagai ruang untuk menguji dan mempertajam pemahaman melalui dialog kritis. Perubahan pandangan yang terjadi tidak berarti P sepenuhnya meninggalkan keyakinan awalnya, tetapi ia menjadi lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima narasi tunggal, serta menyadari bahwa pemahaman yang utuh membutuhkan eksplorasi dari berbagai sumber informasi.

Proses ini sejalan dengan konsep *deliberative democracy* yang menekankan pentingnya pertukaran argumen rasional dalam pembentukan opini publik (Habermas, 1989). Namun perlu dicatat bahwa diskusi ini terjadi di komunitas-komunitas informal yang dipilih oleh informan sendiri (gereja, perkumpulan mahasiswa), bukan dalam forum yang didesain oleh peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa potensi diskursif sudah ada secara alami dalam komunitas-komunitas tersebut, dan peneliti hanya menangkap dinamika yang sudah berlangsung.

Temuan ini memperkuat penelitian Ida et al. (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa di media sosial lebih banyak bersifat pasif seperti menyukai konten politik dan berbagi informasi, sementara interaksi dialogis yang mendalam masih terbatas. Partisipasi di media sosial cenderung bersifat reaktif yaitu mahasiswa merespons isu yang sedang viral tanpa pemahaman mendalam terhadap substansi kebijakan yang diangkat (Molaei, 2014; Lim, 2013).

Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa film dokumenter berperan sebagai stimulus yang memicu pertukaran argumen yang lebih mendalam dibandingkan media teks seperti berita atau artikel. G mengungkapkan:

"Kalau baca berita, saya cuma baca dan selesai. Tapi setelah nonton film, saya merasa ada dorongan untuk membicarakannya dengan teman-teman" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa film dokumenter memiliki kemampuan unik untuk menciptakan keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan media teks. Hal ini disebabkan oleh kombinasi elemen visual, naratif, dan emosional yang bekerja secara simultan dalam film, menciptakan pengalaman yang tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga afektif. Media teks, di sisi lain, cenderung dikonsumsi secara pasif dan individual yakni pembaca dapat menutup artikel dan segera melupakan isinya tanpa dorongan untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Film dokumenter, dengan kekuatan visual dan naratifnya, menciptakan pengalaman emosional dan intelektual yang mendalam, yang kemudian mendorong penonton untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman tersebut dengan orang lain (Kahana, 2008; Smaill, 2007).

Dengan demikian, pola interaksi horizontal yang terbentuk dalam diskusi film dokumenter tidak hanya menciptakan ruang dialog yang lebih demokratis, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, negosiasi makna, dan pembentukan opini yang lebih matang. Hal ini berbeda secara signifikan dengan partisipasi politik di media sosial yang sering kali dangkal, reaktif, dan tersebar tanpa struktur dialogis yang memadai.

Peran Film Dokumenter sebagai Stimulus Komunikasi

Film dokumenter berperan sebagai stimulus yang efektif untuk memicu diskusi karena kemampuannya menghadirkan realitas secara visual dan emosional. Informan mengungkapkan bahwa tayangan visual dan kesaksian langsung dalam film mendorong mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat.

P menyatakan bahwa bagian yang paling mendorongnya untuk berbicara adalah adegan penggundulan hutan:

"Bagian yang saya lihat itu mereka menggunduli hutan. Sampai hati sekali, disitu mereka mencari makan. Tempat dimana mereka mencari makan. Dan ada juga momen dimana mama-mama bilang mereka kalau pergi ke hutan itu cuma beberapa langkah saja mereka sudah bisa tangkap babi" (P, wawancara, 2026).

Dari pernyataan ini, dapat diinterpretasikan bahwa film dokumenter tidak hanya menyajikan informasi faktual tentang kebijakan pembangunan, tetapi juga membangkitkan respons emosional yang mendalam melalui penggambaran visual yang konkret. Ungkapan "sampai hati sekali" mencerminkan empati yang muncul ketika P menyaksikan bagaimana masyarakat adat kehilangan akses ke sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. Film mampu menerjemahkan isu kebijakan yang abstrak menjadi pengalaman visual yang menyentuh seperti pohon-pohon yang ditebang, lahan yang gundul, dan kesaksian mama-mama yang menggambarkan betapa dekatnya mereka dengan hutan sebagai sumber kehidupan. Respons emosional inilah yang kemudian mendorong P untuk tidak hanya diam, tetapi berbicara dan menyampaikan pendapatnya dalam forum diskusi. Dengan kata lain, film dokumenter berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) yang mengubah penonton dari konsumen pasif menjadi partisipan aktif dalam diskusi.

G juga mengungkapkan bahwa adegan-adegan tertentu dalam film membuatnya merasa tidak nyaman dan marah:

"Saya merasa marah ketika melihat masyarakat adat diperlakukan tidak adil. Rasa marah itu membuat saya ingin berbicara dan berbagi dengan teman-teman" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa respons emosional yang muncul dari menonton film dalam hal ini rasa marah atas ketidakadilan yang menjadi pendorong yang kuat bagi partisipasi diskursif. Rasa marah yang dialami G tidak berhenti sebagai emosi individual, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan komunikatif, yaitu keinginan untuk berbicara dan berbagi dengan teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa film dokumenter memiliki kekuatan untuk membangkitkan apa yang oleh Nichols (2017) disebut sebagai kesadaran kritis dan dorongan untuk mengambil sikap terhadap isu yang ditampilkan. Emosi yang muncul bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk bagi proses refleksi kolektif yang lebih mendalam.

P mengungkapkan bahwa film dokumenter membantu mahasiswa memahami isu kebijakan yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dicerna dibandingkan media teks:

"Saya lebih paham isu Papua setelah menonton film dibandingkan hanya membaca berita. Saya bisa melihat langsung wajah-wajah mereka, mendengar suara mereka, dan merasakan emosi mereka" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengandung interpretasi penting tentang keunggulan film dokumenter sebagai medium pembelajaran. *Pertama*, film dokumenter menyajikan informasi melalui multimodalitas yaitu kombinasi visual, audio, dan narasi yang bekerja secara simultan sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan teks yang hanya mengandalkan satu saluran komunikasi. *Kedua*, frasa "melihat langsung" menunjukkan bahwa film menciptakan ilusi kehadiran (*presence*), seolah-olah penonton secara langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi. Pengalaman ini menciptakan apa yang disebut sebagai *immersive experience*, dimana penonton tidak sekadar menerima informasi, tetapi merasakan keterlibatan emosional dan sensorik dengan realitas yang ditampilkan. *Ketiga*, P menyebutkan tiga elemen kunci yaitu wajah, suara, dan emosi, yang semuanya bersifat personal dan manusiawi, sangat berbeda dengan data statistik atau teks berita yang cenderung abstrak dan impersonal. Dengan demikian, film dokumenter menjembatani jarak kognitif antara mahasiswa dengan isu kebijakan yang kompleks, mengubah sesuatu yang sebelumnya terasa jauh dan abstrak menjadi konkret, dekat, dan manusiawi.

Film dokumenter juga memicu rasa penasaran dan keingintahuan informan. **P** menyatakan:

"Setelah nonton film, saya jadi bertanya-tanya, 'Apakah ini benar-benar terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah? Apakah ada solusi?' Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong saya untuk mencari informasi lebih lanjut" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa film dokumenter tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga memicu pertanyaan-pertanyaan kritis yang mendorong proses pencarian pengetahuan lebih lanjut. P tidak menerima narasi film secara pasif; ia justru merespons dengan skeptisisme yang sehat ("Apakah ini benar-benar terjadi?") dan keingintahuan tentang kebijakan pemerintah ("Apa yang dilakukan pemerintah?") serta solusi yang mungkin ("Apakah ada solusi?"). Rasa penasaran ini menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk tidak hanya menerima narasi film secara pasif, tetapi juga mengkritisinya dan mencari sumber informasi lain untuk memverifikasi atau melengkapi pemahaman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa film dokumenter berfungsi sebagai titik awal (*starting point*) bagi proses pembelajaran yang lebih luas dan mandiri, bukan sebagai sumber informasi tunggal yang final.

P secara spesifik menyebutkan bahwa ia mencari informasi tambahan di YouTube:

"Setelah saya menonton film Pesta Babi, saya sudah nonton beberapa kali, dua kali. Yang pertama itu karena sangat amat kepo jadi saya cari di Youtube. Dari situ Youtube saya cari, oh ada nih saya nonton semua. Saya kira itu kayak bohong... Jadi habis itu nanti dibuat lagi di gereja, langsung oh ini sama berarti saya cari lagi si pemilik PT perusahaan-perusahaan tersebut itu" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengandung beberapa lapisan makna yang perlu diinterpretasikan secara mendalam. *Pertama*, ungkapan "sangat amat kepo" menunjukkan tingkat rasa penasaran yang tinggi yang dipicu oleh film. Rasa penasaran ini mendorong P untuk secara proaktif mencari film tersebut di YouTube dan menontonnya berulang kali yakni bukan hanya sekali, tetapi dua kali. *Kedua*, frasa "Saya kira itu kayak bohong" mencerminkan skeptisisme awal P terhadap kebenaran narasi yang ditampilkan dalam film. Ia tidak serta-merta percaya, tetapi merasa perlu memverifikasi sendiri

kebenaran informasi tersebut. *Ketiga*, ketika P menonton film tersebut kembali di gereja dan melihat bahwa isinya sama persis dengan yang ia tonton di YouTube, ia menjadi semakin yakin dan justru semakin penasaran untuk mencari tahu lebih dalam yaitu kali ini tentang siapa pemilik perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam film. Hal ini menunjukkan bahwa film dokumenter tidak hanya menjadi sumber informasi tunggal, tetapi juga menjadi titik awal bagi proses pencarian pengetahuan yang lebih luas dan mandiri. P tidak berhenti pada film, tetapi menggunakan film sebagai batu loncatan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang aktor-aktor di balik kebijakan yang dikritik dalam film.

G juga menyatakan bahwa film dokumenter lebih efektif memicu diskusi dibandingkan membaca berita:

"Kalau baca berita, saya cuma baca dan selesai. Tapi setelah nonton film, saya merasa ada dorongan untuk membicarakannya dengan teman-teman. Film membuat isu terasa lebih nyata dan dekat" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa film dokumenter memiliki kemampuan unik untuk menjembatani jarak antara penonton dengan isu yang ditampilkan. Media teks seperti berita cenderung menciptakan pengalaman yang bersifat transaksional dan individual dimana pembaca menerima informasi, memprosesnya secara kognitif, dan kemudian melanjutkan aktivitas lain tanpa dorongan untuk berbagi atau mendiskusikan. Sebaliknya, film dokumenter menciptakan pengalaman yang bersifat transformasional dan kolektif dimana penonton tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasakan keterlibatan emosional yang mendorong mereka untuk berbagi pengalaman tersebut dengan orang lain. Frasa "terasa lebih nyata dan dekat" menunjukkan bahwa film dokumenter berhasil mengatasi apa yang disebut sebagai *psychological distance* yaitu jarak psikologis antara individu dengan isu yang jauh secara geografis atau sosial. Film menjembatani jarak ini dengan menghadirkan realitas secara visual dan emosional, sehingga isu kebijakan yang sebelumnya terasa abstrak menjadi konkret dan personal.

G menambahkan:

"Saya tidak akan pernah membaca artikel panjang tentang Papua. Tapi setelah menonton film selama satu jam, saya jadi tertarik untuk tahu lebih banyak" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa film dokumenter mampu menjangkau audiens yang mungkin tidak memiliki minat atau kesadaran awal terhadap isu-isu kebijakan tertentu. G secara jujur mengakui bahwa ia tidak akan pernah secara sukarela membaca artikel panjang tentang Papua—menunjukkan bahwa media teks memiliki keterbatasan dalam menjangkau audiens yang tidak memiliki minat awal. Namun, film dokumenter dengan format visual dan naratif yang menarik berhasil menembus hambatan ini. Dalam durasi satu jam, film mampu membangun keterlibatan yang cukup kuat untuk mengubah ketidaktertarikan menjadi rasa ingin tahu yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa film dokumenter memiliki potensi sebagai alat pendidikan politik yang inklusif, mampu menjangkau mereka yang mungkin teralienasi dari wacana kebijakan publik yang kompleks.

Penggunaan visual, narasi, dan kesaksian masyarakat adat dalam film memengaruhi cara informan memahami isu yang diangkat. P menyatakan:

"Melihat langsung wajah-wajah mereka dan mendengar cerita mereka membuat saya lebih percaya daripada membaca data atau angka di berita" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa visual dan kesaksian menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kredibilitas emosional yaitu suatu bentuk kepercayaan yang tidak dimiliki oleh data statistik. Data dan angka di berita mungkin akurat secara faktual, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan empati dan koneksi personal. Sebaliknya, melihat wajah-wajah masyarakat adat dan mendengar cerita mereka secara langsung menciptakan ikatan emosional yang membuat informasi terasa lebih autentik dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas tidak hanya dibangun melalui akurasi faktual, tetapi juga melalui keterlibatan emosional dan pengakuan terhadap pengalaman manusiawi di balik data. Film dokumenter, dengan kemampuannya untuk menampilkan wajah dan suara, menciptakan apa yang oleh Nichols (2017) disebut sebagai *embodied knowledge* yaitu pengetahuan yang tidak hanya diolah secara kognitif tetapi juga dirasakan secara emosional dan fisik.

G mengungkapkan:

"Saya merasa diajak untuk berpikir kritis, bukan sekadar diberi informasi. Dari segi visual bahkan audio yang mendukung juga dan tentunya yang paling penting adalah kesaksian dari beberapa tokoh-tokoh yang direkam itu cukup membuat isu ini terasa lebih nyata" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengandung interpretasi penting tentang bagaimana film dokumenter memengaruhi cara penonton memahami isu. *Pertama*, G membedakan antara "diberi informasi" dan "diajak untuk berpikir kritis" yaitu menunjukkan bahwa film dokumenter tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun argumen melalui struktur naratif yang dirancang untuk memengaruhi cara penonton memahami isu. *Kedua*, G menyebut tiga elemen kunci yang bekerja bersama dalam film: visual, audio, dan kesaksian. Visual memberikan bukti yang dapat dilihat; audio menciptakan suasana dan memperkuat dampak emosional; dan kesaksian memberikan otoritas personal dan kredibilitas emosional. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan meyakinkan. *Ketiga*, frasa "membuat isu ini terasa lebih nyata" kembali menegaskan kemampuan film dokumenter untuk menjembatani jarak antara penonton dengan realitas yang ditampilkan.

Temuan ini mendukung argumen Nichols (2017) dan Renov (1993) bahwa film dokumenter mampu membentuk perspektif kognitif penonton karena kombinasi visual, narasi, dan kesaksian langsung menciptakan pengalaman emosional dan intelektual yang lebih mendalam dibandingkan media teks. Film dokumenter berfungsi sebagai medium yang menjembatani jarak kognitif antara mahasiswa dan kompleksitas isu kebijakan (Nichols, 2017; Renov, 1993). Sebagai *boundary object*, film dokumenter menyediakan representasi visual dan naratif yang dapat diakses dan dipahami oleh berbagai audiens dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi tentang isu-isu kebijakan yang mungkin sebelumnya terasa terlalu rumit atau jauh dari pengalaman mereka.

Selain itu, **G** menyebutkan adanya jurnalis yang ikut menonton dan memberikan informasi terkini:

"Pas jurnalis itu mengatakan, waktu di film itu masih proses pembangunan ini lho... Tapi per hari waktu jurnalis itu kesana, jurnalis itu udah kesana menyurvei tempat itu. Koramilnya sudah terbangun. Sudah terbangun tidak sesuai dengan di film" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa forum diskusi tidak hanya terbatas pada pembahasan isi film, tetapi juga menghadirkan informasi tambahan dari sumber eksternal yang memperkaya diskusi. Kehadiran jurnalis yang melakukan survei langsung ke lokasi dan memberikan update tentang kondisi terkini—bahwa Koramil yang dalam film masih dalam proses pembangunan kini telah berdiri—menambah dimensi faktual pada diskusi. Informasi ini memungkinkan peserta untuk membandingkan realitas yang ditampilkan dalam film dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga diskusi menjadi lebih berbasis bukti dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi terhubung dengan realitas eksternal melalui kehadiran narasumber yang kompeten.

Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa peran film dokumenter sebagai stimulus komunikasi tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif. Informan melaporkan bahwa adegan-adegan tertentu dalam film membuat mereka merasa tidak nyaman, marah, atau penasaran. Respons emosional ini menjadi pendorong yang kuat bagi partisipasi diskusi. Film dokumenter dengan demikian tidak hanya merangsang pemikiran kritis, tetapi juga membangkitkan keterlibatan emosional yang mendorong tindakan komunikatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Nichols (2017), film dokumenter memiliki kekuatan untuk menggugah kesadaran dan mendorong penonton untuk mengambil sikap terhadap isu yang ditampilkan.

Dengan demikian, film dokumenter terbukti memiliki peran ganda: sebagai alat pendidikan yang efektif dan sebagai pemicu partisipasi komunikatif. Film dokumenter tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun jembatan antara pengetahuan abstrak dan pengalaman konkret, serta antara individu dan isu-isu sosial yang lebih luas. Hal ini menjadikan film dokumenter sebagai medium yang sangat potensial untuk memperkuat partisipasi politik mahasiswa dalam format yang lebih dialogis dan terstruktur dibandingkan media sosial.

Bentuk Partisipasi yang Dihasilkan

Berdasarkan laporan informan, pengalaman menonton dan berdiskusi film dokumenter menghasilkan beberapa bentuk partisipasi yang dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu partisipasi intelektual, partisipasi diskursif, dan partisipasi reflektif.

1. Partisipasi Intelektual

Pada tingkat intelektual, mahasiswa terdorong untuk mencari informasi tambahan setelah menonton film. **P** menyatakan:

"Saya jadi mencari berita lain tentang Papua untuk membandingkan dengan apa yang ditampilkan di film... Saya cek media lain untuk melihat apakah ada sudut pandang berbeda yang tidak ditampilkan dalam film" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa film dokumenter tidak hanya menjadi sumber informasi tunggal, tetapi juga menjadi titik awal bagi proses pencarian pengetahuan yang lebih luas dan kritis. P tidak menerima narasi film secara pasif, tetapi secara aktif berusaha memverifikasi, membandingkan, dan melengkapi pemahamannya dengan sumber-sumber lain. Tindakan "mencari berita lain" dan "cek media lain" menunjukkan adanya kesadaran bahwa setiap medium memiliki keterbatasan dan bias, sehingga diperlukan perspektif ganda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Hal ini sejalan dengan konsep literasi media kritis, dimana penonton tidak hanya mengonsumsi konten media, tetapi juga secara aktif mengevaluasi, menganalisis, dan mempertanyakan informasi yang disajikan (Limilia & Fuady, 2021).

G juga mengungkapkan bahwa ia mencari informasi dari sumber lain:

"Tentu ya, karena pasti setiap film dokumenter itu memiliki sudut pandang tertentu. Pastinya keinginan untuk membaca jurnal, berita, ataupun pendapat" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengandung interpretasi penting tentang kesadaran informan akan sifat subjektif film dokumenter. G menyadari bahwa "setiap film dokumenter itu memiliki sudut pandang tertentu", sebuah pemahaman kritis bahwa dokumenter bukanlah cermin realitas yang netral, melainkan konstruksi naratif yang dibangun dari perspektif tertentu. Kesadaran ini mendorong G untuk tidak hanya mengandalkan film sebagai sumber tunggal, tetapi juga mencari informasi dari berbagai jenis sumber, seperti jurnal akademik yang memberikan analisis mendalam, berita yang memberikan informasi faktual terkini, dan pendapat yang memberikan perspektif alternatif. Keragaman sumber yang dicari menunjukkan bahwa partisipasi intelektual yang terjadi tidak bersifat dangkal, tetapi melibatkan upaya sistematis untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan seimbang.

Bentuk partisipasi intelektual ini memperlihatkan bahwa film dokumenter berfungsi sebagai katalisator bagi proses pembelajaran mandiri. Mahasiswa tidak berhenti pada pengalaman menonton, tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan untuk eksplorasi pengetahuan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter memiliki potensi untuk mengembangkan kapasitas literasi media dan berpikir kritis mahasiswa, yang merupakan keterampilan esensial dalam partisipasi politik yang substantif.

2. Partisipasi Diskursif

Pada tingkat diskursif, mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas komunikasi dalam forum diskusi. Berdasarkan laporan informan, bentuk partisipasi diskursif yang paling sering dilakukan adalah menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat teman, mengajukan pertanyaan, dan menyanggah argumen.

P mengungkapkan:

"Saya lebih banyak mendengar karena saya belum paham isu ini, tapi setelah mendengar pendapat teman, saya berani bertanya" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa diskusi film dokumenter menciptakan ruang aman (*safe space*) bagi mahasiswa yang awalnya pasif atau kurang percaya diri untuk mulai berpartisipasi. P mengakui bahwa awalnya ia lebih banyak mendengar karena merasa belum memahami isu yang dibahas. Namun, setelah mendengar pendapat teman-temannya, ia merasa cukup percaya diri untuk mengajukan pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa forum diskusi yang bersifat horizontal dan suportif memungkinkan terjadinya apa yang disebut sebagai *scaffolding participation*, yaitu partisipasi bertahap dimana peserta yang awalnya pasif secara perlahan-lahan membangun kepercayaan diri untuk terlibat lebih aktif. Proses ini penting karena menunjukkan bahwa partisipasi diskursif tidak harus dimulai dengan pernyataan pendapat yang berani, tetapi dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti mengajukan pertanyaan, yang kemudian berkembang menjadi keterlibatan yang lebih mendalam.

G menyatakan:

"Saya menyampaikan pendapat tentang film ini, dan teman-teman saya menanggapinya. Kadang kami setuju, kadang tidak, tapi itu membuat diskusi semakin menarik" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pertukaran argumen dalam diskusi film dokumenter memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi publik yang esensial. G secara aktif menyampaikan pendapatnya, menerima tanggapan dari teman-teman, dan mengalami dinamika persetujuan dan ketidaksetujuan yang membuat diskusi menjadi hidup dan menarik. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat, menerima tanggapan, dan merespons secara konstruktif merupakan keterampilan komunikasi yang sangat berharga dalam konteks partisipasi politik yang demokratis. Diskusi yang melibatkan persetujuan dan ketidaksetujuan, tanpa menjadi konfrontatif atau destruktif, menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengelola perbedaan pendapat secara dewasa dan konstruktif. Hal ini berbeda secara signifikan dengan interaksi di media sosial yang sering kali didominasi oleh polarisasi ekstrem dan serangan personal.

Yang menarik, beberapa informan melaporkan adanya perubahan pandangan setelah mengikuti diskusi. **P** menyatakan:

"Awalnya saya pikir pembangunan harus jalan terus, apa pun risikonya. Tapi setelah nonton film dan mendengar pendapat teman-teman, saya menyadari bahwa hak masyarakat adat tidak bisa diabaikan. Pembangunan harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengandung interpretasi penting tentang transformasi pemahaman yang terjadi melalui proses diskusi. *Pertama*, P mengakui bahwa sebelumnya ia memiliki pandangan yang sederhana dan tanpa syarat tentang pembangunan, yaitu "harus jalan terus, apa pun risikonya". Pandangan ini mencerminkan apa yang oleh Freire (1970) sebut sebagai kesadaran naif (*naive consciousness*), yaitu pemahaman yang belum mempertimbangkan kompleksitas dan konsekuensi dari suatu kebijakan. *Kedua*, melalui pengalaman menonton film dan berdiskusi, P mengalami

pergeseran pemahaman yang signifikan. Ia mulai menyadari bahwa hak masyarakat adat tidak bisa diabaikan, dan bahwa pembangunan harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter tidak hanya membangun pemahaman, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mempertimbangkan ulang posisi mereka terhadap isu kebijakan. *Ketiga*, perubahan pandangan P tidak bersifat radikal atau ekstrem. Ia tidak sepenuhnya menolak pembangunan, tetapi menjadi lebih kritis dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter mendorong terbentuknya kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang lebih matang dan berimbang.

G mengungkapkan:

"Saya awalnya sangat setuju dengan sudut pandang film, tapi setelah teman saya menunjukkan bahwa film ini hanya menampilkan satu sisi, saya mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada informasi lain yang perlu saya cari. Saya jadi tidak langsung percaya begitu saja pada film" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa diskusi film dokumenter mendorong mahasiswa untuk mengembangkan sikap skeptis yang sehat terhadap media. G mengakui bahwa awalnya ia menerima narasi film secara antusias ("sangat setuju"), namun setelah temannya menunjukkan keterbatasan film, yaitu bahwa ia hanya menampilkan satu sisi, G mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya informasi lain. Perubahan dari penerimaan tanpa syarat menjadi sikap kritis dan reflektif ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter tidak berfungsi sebagai alat indoktrinasi, tetapi sebagai ruang untuk menguji dan mempertanyakan narasi yang disajikan. G belajar untuk "tidak langsung percaya begitu saja pada film", sebuah pencapaian penting dalam pengembangan literasi media kritis.

Proses perubahan pandangan ini terjadi melalui negosiasi makna, dimana mahasiswa membandingkan narasi film dengan argumen teman-teman mereka, serta dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh **G**:

"Saya jadi sadar bahwa isu ini lebih kompleks dari yang saya bayangkan. Tidak ada jawaban hitam-putih" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa diskusi film dokumenter mendorong mahasiswa untuk meninggalkan pemikiran dikotomis (hitam-putih) dan mengadopsi pemahaman yang lebih nuansa dan kompleks. Kesadaran bahwa isu kebijakan publik tidak memiliki jawaban tunggal yang sederhana merupakan indikasi penting dari perkembangan kapasitas berpikir kritis dan demokratis.

3. Partisipasi Reflektif

Pada tingkat reflektif, mahasiswa melaporkan adanya peningkatan kesadaran terhadap isu kebijakan dan keinginan untuk terlibat lebih lanjut. **P** menyatakan:

"Saya jadi lebih perhatian dengan isu hak masyarakat adat. Saya ingin tahu lebih banyak dan mungkin berbagi dengan orang lain" (P, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa diskusi film dokumenter tidak hanya berhenti pada forum diskusi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk menjadi agen informasi yang aktif di lingkungan mereka. P tidak hanya mengalami perubahan kesadaran personal ("lebih perhatian"), tetapi juga memiliki keinginan untuk bertindak ("ingin tahu lebih banyak") dan berbagi dengan orang lain. Keinginan untuk berbagi informasi menunjukkan bahwa P melihat dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kesadaran kepada orang lain, sebuah bentuk partisipasi yang melampaui forum diskusi dan menjangkau lingkaran sosial yang lebih luas.

G mengungkapkan:

"Saya ingin bertanya langsung kepada pembuat film tentang bagaimana mereka memilih narasumber dan memastikan keakuratan informasi" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan adanya keinginan untuk berdialog dengan pembuat film, sebuah bentuk partisipasi yang lebih langsung dan kritis. G tidak puas hanya dengan menerima narasi film, tetapi ingin memahami proses produksi di balik film tersebut, yaitu bagaimana narasumber dipilih dan bagaimana keakuratan informasi dipastikan. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan tingkat literasi media yang tinggi, dimana penonton tidak hanya mengkonsumsi konten, tetapi juga mempertanyakan proses produksi dan etika di baliknya. Keinginan untuk berdialog dengan pembuat film juga menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter dapat membuka saluran komunikasi antara penonton dan pembuat konten, menciptakan ruang untuk akuntabilitas dan transparansi.

G juga menyatakan bahwa setelah diskusi, ia memahami bahwa pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat seharusnya dapat berjalan beriringan:

"Setelah mengikuti diskusi, saya memahami bahwa pembangunan dan perlindungan hak dari masyarakat adat itu seharusnya dapat berjalan beriringan. Bersama melalui satu, komunikasi yang baik dan saling terbuka tentunya. Terus kerjasama yang baik dan yang ketiga itu seperti kita, kebijakan yang adil" (G, wawancara, 2026).

Pernyataan ini mengandung interpretasi penting tentang pemahaman solutif yang berkembang melalui diskusi. G tidak hanya memahami masalah, yaitu bahwa ada ketegangan antara pembangunan dan hak masyarakat adat, tetapi juga mulai merumuskan solusi yang konstruktif. Ia mengidentifikasi tiga elemen kunci yang diperlukan agar pembangunan dan perlindungan hak dapat berjalan beriringan. *Pertama*, komunikasi yang baik dan saling terbuka. *Kedua*, kerja sama yang baik antara semua pihak. *Ketiga*, kebijakan yang adil. Pemahaman solutif ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter tidak hanya menghasilkan kritik, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir tentang kemungkinan solusi dan perubahan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi reflektif yang tidak hanya berhenti pada kesadaran, tetapi juga mendorong tindakan dan advokasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang resepsi film dokumenter yang menunjukkan adanya negosiasi makna antara penonton dengan narasi film (Renov, 1993; Winston, 2008). Penonton tidak menerima makna film secara pasif, tetapi secara aktif menegosiasikan makna tersebut dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang mereka miliki. Proses negosiasi makna ini diperkuat melalui diskusi dengan sesama penonton, dimana berbagai perspektif dipertukarkan dan diuji.

4. Siklus Partisipasi yang Saling Terkait

Bentuk-bentuk partisipasi yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu intelektual, diskursif, dan reflektif, saling terkait dan membentuk siklus yang memperkuat kapasitas partisipatif mahasiswa. Partisipasi intelektual, seperti mencari informasi tambahan, memperkaya pengetahuan mahasiswa, yang kemudian menjadi modal bagi partisipasi diskursif, seperti menyampaikan pendapat, menyanggah, dan bertanya dalam forum diskusi. Partisipasi diskursif, pada gilirannya, mendorong partisipasi reflektif, seperti perubahan pandangan, peningkatan kesadaran, dan keinginan untuk terlibat lebih lanjut. Siklus ini menunjukkan bahwa diskusi film dokumenter tidak hanya menghasilkan partisipasi yang bersifat jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas partisipatif yang berkelanjutan.

Proses siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut. Mahasiswa mulai dengan menonton film sebagai stimulus, yang memicu rasa penasaran dan keingintahuan sebagai bentuk partisipasi intelektual. Rasa penasaran ini mendorong mereka untuk mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, yang memperkaya pemahaman mereka. Pemahaman yang lebih kaya ini kemudian menjadi modal bagi mereka untuk terlibat dalam diskusi sebagai partisipasi diskursif, dimana mereka menyampaikan pendapat, menanggapi argumen teman, dan mempertimbangkan perspektif alternatif. Melalui proses diskursif ini, mahasiswa mengalami perubahan pandangan dan peningkatan kesadaran sebagai partisipasi reflektif, yang kemudian mendorong mereka untuk terus belajar dan terlibat lebih lanjut, memulai siklus baru dengan tingkat pemahaman dan keterlibatan yang lebih tinggi.

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa media audiovisual memiliki potensi untuk mendorong partisipasi politik yang lebih substantif dibandingkan media teks atau media sosial (Nolan, 2010; Nichols, 2017). Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi yang dihasilkan tidak muncul secara otomatis dari menonton film, tetapi membutuhkan struktur forum diskusi yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen yang setara dan terbuka. Tanpa adanya ruang diskusi yang terstruktur, film dokumenter mungkin hanya akan dikonsumsi secara individual dan pasif, tanpa menghasilkan partisipasi yang berarti.

Dengan demikian, diskusi film dokumenter terbukti mampu menjadi alternatif medium komunikasi partisipatif yang lebih terstruktur dibandingkan partisipasi politik di media sosial. Partisipasi di media sosial cenderung bersifat reaktif, dangkal, dan tersebar, sementara diskusi film dokumenter memungkinkan terjadinya pertukaran argumen yang mendalam, negosiasi makna, dan pembentukan opini yang lebih matang. Temuan ini sekaligus menjawab kesenjangan penelitian tentang minimnya kajian yang mengintegrasikan film dokumenter dengan kerangka komunikasi partisipatif dalam konteks mahasiswa Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa film dokumenter, jika dikombinasikan dengan forum diskusi yang terstruktur, dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat partisipasi politik mahasiswa dalam format yang lebih dialogis dan substantif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman menonton dan berdiskusi film dokumenter di komunitas-komunitas informal (gereja, perkumpulan mahasiswa) mampu membentuk tiga pola partisipasi komunikatif yang menjawab tujuan penelitian. Pertama, pola interaksi horizontal tercipta melalui pertukaran argumen yang setara, dimana mahasiswa saling menyanggah, menanggapi, dan mempertimbangkan ulang pandangan mereka secara tatap muka, berbeda dengan partisipasi di media sosial yang cenderung monologis dan reaktif. Kedua, film dokumenter berperan sebagai stimulus komunikasi yang efektif karena kombinasi visual, narasi, dan kesaksian langsung mampu membangkitkan respons emosional dan intelektual yang mendorong mahasiswa untuk berdiskusi, serta memicu rasa penasaran untuk mencari informasi tambahan dari berbagai sumber sebagai proses verifikasi dan pelengkap pemahaman. Ketiga, pengalaman menonton dan berdiskusi film dokumenter menghasilkan partisipasi dalam tiga tingkatan yang saling terkait: intelektual (mencari informasi tambahan), diskursif (bertanya, menyampaikan pendapat, menyanggah), dan reflektif (perubahan pandangan dan peningkatan kesadaran terhadap isu kebijakan). Dengan demikian, film dokumenter terbukti menjadi medium yang efektif untuk mendorong partisipasi politik mahasiswa dalam format yang lebih dialogis dan substantif dibandingkan media sosial, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep partisipasi komunikatif dalam konteks pendidikan politik serta bagi perguruan tinggi dalam merancang program literasi media dan penguatan ruang publik mahasiswa yang dialogis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Tanpa partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Arrazak, M. A., & Adnan, M. F. (2025). The influence of social media usage and political trust on young voters political participation in Padang City. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v21i1.8814>
- Asia Research Institute, National University of Singapore. (2019, March 21). *Indonesia Study Group – Film Screening – "Rayuan Pulau Palsu" (The Fake Islands) by Mr Dandhy Laksono*. <https://ari.nus.edu.sg/events/indonesia-study-group-film-screening-rayuan-pulau-palsu-the-fake-islands-by-mr-dandhy-laksono/>
- Asih, U. D. R., Novianto, V., & Setiawati, E. (2025). Reposisi gerakan mahasiswa Indonesia: Dari gerakan reformasi 1998 hingga gerakan digital 2025. Dalam *Proceedings of International Conference of Islamic Studies (ICONIS 2025)*. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-463-6_126
- Aufderheide, P. (2005). *Documentary film: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

Budi Irawanto. (2010). Budi Irawanto on documentary films. Dalam G. C. Khoo & T. Barker (Eds.), *Mau Dibawa Ke Mana Sinema Kita (What's the Direction of Our Cinema)*. Yayasan Seni Ciputra Film.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Djumadin, Z. (2021). Student political participation and the future of democracy in Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2399-2408. <https://doi.org/10.1177/0163443719884052>

Fau, P. K. (2024). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi Generasi Z pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 (Studi kasus pemilihan Generasi Z di Universitas Kristen Indonesia). *Journal of Governance and Social Issues*, 4(2), 97-100.

Gaines, J. M. (2007). Political mimesis. Dalam J. M. Gaines & M. Renov (Eds.), *Collecting visible evidence* (pp. 84-102). University of Minnesota Press.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Karya asli diterbitkan 1962)

Halida, R. (2020). It's not the Facebook access, but the partisan bias which predicts belief in misinformation: The case of 2019 Indonesia presidential election. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 24(2), 154-165. <https://doi.org/10.7454/hubs.asia.1120620>

Haris, A., Asmara, Y. A. D., & Prastyo, A. B. (2024). The influence of social media Instagram on generation Z's political participation. *Paradigma: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 21(1), 189-202. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v21i1.8814>

Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: A comparative study of Indonesia and Pakistan. *Quality & Quantity: International Journal of Methodology*, 1-13. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9>

Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). Persistence of social media on political activism and engagement among Indonesian & Pakistani youths. *Journal of Web-based Communities*, Inderscience Publisher. <https://doi.org/10.1504/IJWBC.2020.10028448>

Kahana, J. (2008). *Intelligence work: The politics of American documentary*. Columbia University Press.

Kholid, A., Husein, R., Mutiarin, D., & Listiya E. R, S. (2015). The influence of social media towards student political participation during the 2014 Indonesian presidential election. *Journal of Government and Politics*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/jgp.2015.0019>

Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social media's influence on political participation: Insights from a systematic review and meta-analysis in Indonesian psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 236. <https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>

Latif, I. R., Afriandi, F., Saputra, I. M., Marefanda, N., Marlizar, D., Sari, N., Aziz, C. I., Fahlevi, R., Alqarni, W., & Akbar, A. (2025). Songsong Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024: Upaya Penguatan Literasi Politik bagi Pemilih Pemula di Takengon, Aceh Tengah. *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 25-41.

Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769303>

Limilia, P., & Fuady, I. (2021). Literasi media, chilling effect, dan partisipasi politik remaja. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 40-48. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.31939>

- Mashud, M., Ida, R., & Saud, M. (2022). Political discussions lead to political efficacy among students in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1-17. <https://doi.org/10.1177/20557811221143674>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Molaei, H. (2014). Active netizens on Facebook: Case study of Indonesians online participation regarding 2009 presidential election. *Paper presented at the Australian and New Zealand Communication Association (ANZCA)*, Old Parliament House, Canberra, Australia.
- Molaei, H. (2015). Discursive opportunity structure and the contribution of social media to the success of social movements in Indonesia. *Information, Communication & Society*, 18(1), 94-108. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.911412>
- Nichols, B. (2017). *Introduction to documentary* (3rd ed.). Indiana University Press.
- Nolan, J. M. (2010). An inconvenient truth increases knowledge, concern, and willingness to act among college students. *Journal of Environmental Education*, 41(4), 231-238. <https://doi.org/10.1080/00958960903439992>
- Permana, A. A. (2022). Pengaruh media sosial sebagai alat komunikasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(5), 200-209. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1667>
- Pratama, A. F., Juwandi, R., & Bahrudin, F. A. (2022). Pengaruh literasi politik dan informasi hoax terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Journal of Civic Education*, 5(1), 11-24. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i1.662>
- Rahmat, A., Ofianto, O., & Fajri Mulyani, F. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa PPKn UNP pada pemilu presiden 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 18964-18973.
- Renov, M. (1993). Toward a poetics of documentary. Dalam M. Renov (Ed.), *Theorizing documentary* (pp. 12-36). Routledge.
- Sari, M., & Zulkarnain. (2024). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat kampus (Studi mahasiswa Prodi PPI FUSI UINSU). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7, 17-23.
- Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., Sadewo, R., & Bachtera, R. A. (2024). Analisis pengaruh terpaan media sosial TikTok terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2024: Pendekatan kuantitatif. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1255-1264. <https://doi.org/10.54082/jupin.512>
- Septian, E., & Wulandari, S. (2024). Building political literacy with Z generation participation in Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1), 147-161.
- Servaes, J. (2008). *Communication for development and social change*. Sage Publications.
- Servaes, J., & Malikhaio, P. (2005). Participatory communication: The new paradigm? Dalam O. Hemer & T. Tufte (Eds.), *Media & Global Change: Rethinking Communication for Development* (pp. 91-103). CLASCO.
- Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & I. (2024). Polarisasi politik melalui interaksi sosial di Instagram: Studi kasus pemilu 2024 di Indonesia. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 4(2), 383-394. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>

Smaill, B. (2007). Documentary film and the politics of pain. *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*, 21(2), 219-229. <https://doi.org/10.1080/10304310701268726>

Syah, R. F., Ekawati, E., Azanda, S. H., Syafarani, T. R., Ayunda, W. A., Zulkifli, M. Y., Rahma, N. M., & Kusumawardani, A. (2025). Hoax and election: The role of social media and challenges for Indonesian government policy. *Studies in Media and Communication*, 13(2), 294-305. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i2.7486>

Turmudi, H. (2019). Participatory communication based on digital platforms for communities in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(1), 70-80.

Winston, B. (2008). *Claiming the real II: Documentary: Grierson and beyond* (2nd ed.). British Film Institute.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.